

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Turki adalah negara yang menarik untuk dikaji. Negara yang kaya akan sejarah. Mulai dari tiga peradaban Konstantinopel, Byzantium dan Ottoman, hingga era Republik Turki modern yang sangat kental dengan ideologi Sekulernya, sampai pada gejolak politik yang terjadi dewasa ini. Skripsi ini akan mengkaji tentang terjadinya kecenderungan otoritarianisme dalam politik pemerintahan Republik Turki di era Presiden Erdogan.

Republik Turki berdiri pada 29 Oktober 1923 ketika Mustafa Kemal Attaturk mengumumkan berdirinya Republik Turki, setelah melalui perlawanan militer terhadap kolonial Eropa yang dipimpin Musthafa Kemal Attaturk serta melakukan revolusi pengambil alihan kekuasaan dari Daulah Ustmaniyah. Dimulai pada 23 Juli 1923 itulah Turki tidak lagi disebut Turki Ustmani atau Kesultanan Ottoman, namun menjadi Republik Turki dimana Mustafa Kemal Attaturk menjadi Presiden pertama. Pada awalnya Kesultanan dipisahkan dari Khilafah Islamiyah, namun pada tahun 1924 Khilafah Islamiyah juga dibubarkan oleh pemerintahan Republik. Pembubaran Khilafah Islamiyah ini menjadi babak baru yakni Sekularisme secara besar-besaran dimulai. Mustafa Kemal melakukan reformasi besar-besaran dengan menghilangkan nilai-nilai Islam sampai keakarnya dan berkiblat kepada Barat.

Diawal berdirinya Republik , Mustafa Kemal berupaya keras untuk mengontrol majelis dan partai politik melalui pendirian Partai Rakyat Republik atau dalam bahasa Turki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP). Partai yang didirikan pada 9 September 1923 ini menjadi mesin penggerak yang efektif dalam mempertahankan ideologi Sekularisme. Dengan partai

inilah ideologi sekularisme bertahan lama di Turki dan juga bertahan di pemerintahan. Presiden dan perdana menteri selalu diduduki oleh orang sekuler.¹

Kemalisme adalah sebutan untuk pemikiran dan ide-ide sekuler yang disungkan oleh Mustafa Kemal Attaturk yang berisikan enam prinsip yakni; Republikanisme, Populisme, Nasionalisme, Sekularisme, Statisme, dan Reformisme. Enam-prinsip dari ideologi kemalisme adalah wasiat yang Mustafa Kemal kepada pasukannya (militer) setahun sebelum dia meninggal. Attaturk mengatakan bahwa militer merupakan pembangunan Turki modern dan pemimpin revolusinya. Sejak saat itu Militer Turki menganggap dirinya sebagai penjaga Republik dan yang dipercayakan menjaga enam prinsip kemalisme dan dijadikan sarana untuk melakukan segala penggulingan kekuasaan dikemudian hari. Dengan ini menggulingkan atau menumbangkan pemerintah-pemerintah sipil yan terpilih jika dinilai menyimpang dari jalan yang merusak prinsip-prinsip Republik Turki ,yakni prinsip sekularisme.

Pada praktiknya, Turki menjadi negara otoritarian dimana militer telah menjadi bagian utama elite kekuasaan. Peran militer atau angkatan bersenjata Turki atau dalam bahasa Turki *Türk Silahlı Kuvvetleri* (TSK) dalam menjaga ideologi Sekuler sangat jelas terlihat dengan terjadinya beberapa kudeta yang dilakukan militer kepada pemimpin yang dianggap tidak pro terhadap kemalis-sekuler. Tercatat terdapat empat kali kudeta yang dilakukan militer yakni tahun 1960, 1971, 1980,dan 1997.²Bahkan dalam doktrin militer, setiap upaya menjaga ideologi Kemalisme dari kelompok fundamentalis adalah kehormatan dan kewajiban setiap anggota militer dalam mencegah kemunduran Turki. Isik Kosoner, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Turki (2010-2011) menegaskan

¹ M Alfian Alfian, *Militer dan Politik di Turki*, PT PENJURU ILMU SEJATI, Bekasi, 2015, hal 35

² Syarif Taghian, *Erdogan Muadzin Istanbul Penakluk Sekularisme Turki*, PUSTAKA AL-KAUTSAR, Jakarta ,2012, hal 97

pandangan ini. Ia mengatakan, “Perlindungan atas karakteristik fundamental Republik (Kemalisme) tidak dapat disebut intervensi politik domestik”.³

Pada 14 Agustus 2001, Recep Tayyip Erdogan mendirikan *Adelet ve kalkinma Partisi* (AKP) yang dalam bahasa Indonesia adalah Partai Keadilan dan Pembangunan. Partai ini didirikan di Ankara bersama Ahmet Aktas, Serap Yahsi Yasar, Burhan Kuzu, dan yang lainnya. Para pendiri partai adalah orang-orang yang pernah berkecimpung dalam partai berideologi Islam, Nasionalis, dan Demokrat, seperti partai Refah yang didirikan oleh Erbakan, Motherland Party yang pernah menduduki kekuasaan Turki dibawah Turgut Ozal dan *Virtue Partisi* dan *Democratic Party*.⁴

Sebelum didirikannya partai AKP, kelompok militer selalu menguasai pemerintahan. Siapapun yang berkuasa di negara Turki pasti berada dibawah bayang-bayang militer, bahkan Erdogan pernah dipenjara oleh militer pada tahun 1998 dengan alasan menantang sekulerisme. Militer menganggap Erdogan membuat kebijakan yang mengancam ideologi Sekulerisme, dimana ketika itu Erdogan menjabat sebagai walikota Istanbul dan membuat kebijakan yang pro terhadap Islam.

Pada pemilihan umum tahun 2002, AKP sebagai partai baru mendapatkan suara paling banyak dan mendapat kursi paling banyak di Majelis Nasional Agung atau Parlemen Turki . Abdullah Gul menjabat sebagai perdana menteri kemudian digantikan oleh Erdogan pada 14 Maret 2003. Pada tahun 2007 AKP kembali memenangkan pemilu, Abdullah Gul menjabat sebagai Presiden dan Erdogan kembali menjabat Perdana Menteri Turki. Begitu juga pada pemilu 2011 , Erdogan kembali terpilih sebagai Perdana Menteri, AKP tetap

³ Ahmad Dzakinin, *Kebangkitan Pos-Islamisme, Analisis Strategi dan Kebijakan AKP Turki memenangkan Pemilu*, PT ERA ADICITRA INTERMEDIA, Solo, 2012, hal 59

⁴ M Alfian Alfian, *Op.cit*, hal 65

menjadi partai dominan meski suara pemilih berkurang. Kepercayaan masyarakat kepada AKP tetap kuat walau adanya ancaman militer. Kemajuan ekonomi yang pesat di Turki lah yang membuat simpati rakyat kepada AKP. Selain itu sosok pemimpin AKP yakni Erdogan dan Gul yang berkhariisma juga dapat membendung desakan militer dan kelompok sekuler.⁵

Semenjak AKP berkuasa,terhitung sejak tahun 2002, terjadi perubahan aliran politik yang dominan drastic. Turki menjadi negara yang lebih demokratis. Dalam hal ini terjadinya transisi demokrasi dimana hak sipil mulai terlihat terang dan mendapat kebebasan dalam bergerak serta menjaga budaya Turki yang sempat hilang. Keberhasilan Erdogan dalam memimpin Turki memberikan kemajuan dalam berbagai bidang. Erdogan dan AKP berhasil merubah Turki dari keterpurukan selama ini dan menjunjung tinggi perdamaian, dengan pembangunan ekonomi dan penegakkan demokrasi. Semangat demokratisasi Turki menjadi peluang untuk meningkatkan citra dan pengaruh Turki di kawasan. Banyak pihak menilai Turki mampu menjadi inspirasi pembangunan demokrasi di kawasan Timur Tengah. Turki dinilai sebagai contoh nyata bagi dunia Arab dalam mewujudkan kebebasan, demokrasi, hak asasi manusia, dan kemajuan ekonomi.⁶

Kekuatan militer di Turki pun “melemah”, dapat dikatakan kekuatan militer setara dengan sipil. Perdana Menteri Erdogan menunjukkan keberhasilan AKP dalam kontrol sipil terhadap militer. Bahkan pada tahun 2003 hingga 2007, yang ditandai Erdogan menjabat sebagai Perdana Menteri, sebenarnya militer sudah mencoba melakukan perlawanan ,tapi dapat dinetralkan oleh AKP. Dapat dikatakan bahwa

⁵ Ahlul Almansyah, Adelet Ve Kalkinma Partisi (AKP) vs Kemalis, Strategi AKP mengubah Arah Kebijakan Politik di Turki, GRAHA ILMU, Yogyakarta,2014, hal 45

⁶ S. Calleya, M. Wohlfeld (ed), 2012,*Change and Opportunities in the Emerging Mediterranean*, Malta: University of Malta, hal 370-371.

merosotnya kekuatan militer dalam panggung politik di Turki sejak AKP berkuasa merupakan salah satu perubahan terpenting dan paling berhasil yang menyentuh struktur pemerintahan Turki sejak berdirinya Republik Turki. Erdogan membersihkan sisa-sisa rezim militer demi terwujudnya kesetaraan hak sipil dan militer. AKP mampu menetralkan posisi militer, sehingga militer tidak bisa campur tangan dalam masalah pemerintahan secara berlebihan. Kebijakan ini harus diambil Turki sesuai dengan standart yang ditentukan oleh Uni Eropa agar Turki bisa bergabung dalam Uni Eropa. Hubungan militer dan sipil pun menjadi cukup seimbang dan dapat dikontrol.⁷

Walaupun AKP adalah partai berbasis Islam, namun AKP juga mengakomodasi kepentingan kelompok-kelompok lain seperti masalah Kurdistan, Syiah, dan tuntutan umat Kristen. Dalam masalah Kurdistan, Erdogan membuka dialog dan memberi jalan tengah, identitas Kurdistan pun diakui di Turki. Kelompok Syiah menuntut adanya tempat ibadah khusus seperti kelompok lainnya, AKP juga memberikan kesempatan untuk berdiskusi. Dalam tuntutan umat Kristen, Pemerintah mengakui kepengurusan Patrick Romawi Ortodoks di Istanbul serta membuka kembali sekolah kependetaan di kepulauan Haibly. Hal ini dilakukan guna terwujudnya keberagaman di Turki dan juga menjadi syarat bergabung dengan Uni Eropa.⁸

Selain itu AKP mendukung pemberdayaan perempuan dan kesetaraan hak laki-laki dan perempuan. Setiap muslimah diperbolehkan untuk memakai jilbab sebagai keyakinan mereka. Dalam bidang media dan pers, AKP mendukung keterbukaan informasi hingga dibuat undang-undang kebebasan pers. Dengan adanya peran pers inilah AKP mampu mereduksi peran militer dalam pemerintahan, begitu juga

⁷ Syarif Taghian, Op.cit hal 111

⁸ Ahlul Almansyah, Op.cit hal 66

adanya kebebasan berekspresi sebagai wujud penegakan demokrasi, Pasal 301 dari KUHP Turki dan Pasal 312 UU melawan teror telah diubah.⁹ Sehingga setiap masalah hak dan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah dapat diproses secara hukum, sesuatu yang berbeda dengan pemerintah yang dulu ketika militer mengatur jalannya pemerintahan.

AKP juga mengadakan beberapa referendum dalam berbagai hal, seperti tentang persidangan atau kedudukan militer, masalah kurdi, masalah jilbab yang dianggap kontroversial oleh kelompok Sekuler. Namun justru hampir 50 persen lebih masyarakat mendukung referedum oleh AKP. Dengan adanya referendum-referendum tersebut yang melahirkan konstitusi baru di Turki, Uni Eropa menganggap adanya demokratisasi di Turki.¹⁰ Artinya referendum-referendum tersebut merupakan awal baru bagi Turki yang Demokratis. Dengan demikian Turki dibawah kekuasaan AKP telah mewujudkan demokratisasi.

Keberhasilan Erdogan dalam memimpin Turki memberikan kemajuan dalam berbagai bidang. Partai AKP mampu menjunjung tinggi perdamaian, membangun perekonomian dan juga menegakkan demokrasi. Banyak pihak menilai Turki mampu menjadi inspirasi bagi pembangunan demokrasi di Timur Tengah. Tokoh Ennahda dari Tunisia, Rachid Ghannouchi menyatakan bahwa mereka belajar dari Turki memadukan Islam dengan modernitas. Turki dipandang sebagai contoh nyata bagi dunia Arab dalam mewujudkan HAM, kebebasan demokrasi dan kemajuan ekonomi.¹¹. Namun, keberhasilan Erdogan dalam membangun Turki memberikan dampak positif maupun negatif bagi kelangsungan politik Turki. Salah satu dampak positifnya adalah Turki telah bebas menggunakan simbol-simbol Islam sebagai identitas Turki. Sedangkan dampak negatifnya adalah

⁹ *Ibid*, halaman 67

¹⁰ *Ibid*, halaman 69

¹¹ S. Calleya, M. Wohlfeld (ed), 2012, *Change and Opportunities in the Emerging Mediterranean*, Malta: University of Malta, hal. 371.

banyak pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Erdogan terutama pihak sekuler.

Pada tahun 2014, tepatnya tanggal 10 Agustus Turki menjalani pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya. Sebuah pesta demokrasi terbesar yang pernah terjadi di Turki. Tiga kandidat yang bersaing memperebutkan posisi tersebut yakni Recep Tayyip Erdogan (ketika itu menjabat perdana menteri), akademisi dan mantan ketua OKI Ekmeleddin Ihsanoglu, dan politisi muda dari suku Kurdi Selahattin Demirtas. Erdogan mengatakan jika dia menang, ia ingin mengubah jabatan seremonial presiden menjadi sumber kekuatan eksekutif negara. Slogan kampanye Erdogan adalah "kehendak rakyat, kekuatan rakyatl." Ia menyatakan apapun hasil pemilu, Turki tidak akan lagi sama. Erdogan berhasil mengalahkan dengan mudah kedua pesaingnya dengan mendapatkan dukungan sekitar 52 % pemilih.¹²

Setelah Erdogan menjabat sebagai presiden, demokrasi yang berjalan justru seolah-olah “menghilang”. Transisi demokrasi yang sudah terjadi justru kembali ke arah otoritarian. Hingga pada tanggal 15 Juli 2016 (hampir dua tahun kepemimpinan Presiden Erdogan) terjadi upaya kudeta yang dilakukan oleh beberapa anggota militer terhadap pemerintah Presiden Recep Tayyip Erdogan. Pada Jumat, 15 Juli 2016 dimana Kendaraan dan pasukan militer menyerbu Ibu Kota Turki, Ankara dan Istanbul. Perdana menteri Yildirim mengumumkan di stasiun televisi bahwa kejadian itu adalah upaya kudeta oleh kelompok militer dan pemberontak. Pada saat itu, Presiden Erdogan sedang berlibur di lokasi yang jauh dari Ankara dan Istanbul.¹³ Erdogan lalu mendorong masyarakat turun ke jalan sebagai upaya protes. Di Ankara, demonstran mengikuti perintah Erdogan untuk turun ke jalan

¹² <http://www.dw.com/id/erdogan-terpilih-jadi-presiden/a-17845680> diakses pada 7 November 2017

¹³ <https://jurnalislam.com/inilah-kronologi-lengkap-kudeta-turki/> diakses pada 7 November 2017

mendukung pemerintahan. Juru bicara intelijen nasional Turki mengumumkan bahwa kudeta telah ditolak. Erdogan akhirnya kembali ke Istanbul sebagai pertanda bahwa kudeta gagal.

Atas kudeta ini Erdogan memberlakukan masa darurat selama tiga bulan. Sebagian masyarakat dan pakar Turki meyakini bahwa kudeta Juli tahun 2016 ini cenderung sebuah kudeta terorganisir ketimbang gerakan spontan dari militer yang tidak puas. Menurut mereka kudeta ini merupakan skenario Erdogan dan timnya di militer. Namun terlepas dari kontroversi tersebut, peristiwa kudeta yang gagal ini menjadi titik balik adanya perubahan politik dimana kekuasaan Erdogan cenderung mengarah ke otoritarian. Status darurat berlaku efektif setelah dipublikasikan di lembaran negara. Selanjutnya, presiden dan kabinet berwenang menetapkan aturan baru tanpa melalui persetujuan parlemen. Hanya dalam sebulan usai kudeta gagal pada 15 Juli 2016, Turki telah mengalami transformasi kebijakan di berbagai bidang, termasuk militer, politik luar negeri, dan hukum.

Erdogan menyatakan dengan tegas bahwa yang melakukan aksi kudeta adalah gerakan Gulenist. Namun pemimpin gerakan Gulenist, Fethullah Gulen yang berada di Amerika Serikat membantah terlibat dalam kudeta. Erdogan meluncurkan operasi pembersihan kaum Gulenis di seantero Turki, termasuk lembaga-lembaga pendidikan dibawah asosiasi Fethullah Gulen. Erdogan menetapkan organisasi gerakan Hizmet yang didirekan Fethullah Gulen sebagai kelompok teroris dan semua pengikutnya disebut sebagai teroris. Seperti dilaporkan AFP, Senin 15 Agustus 2016, dalam waktu sebulan, pemerintah Turki telah menangkap dan menahan lebih dari 60.000 warganya yang dituding sebagai kelompok Gulenis. AFP juga menyebutkan bahwa kebijakan Erdogan yang melakukan pembersihan massal Gulenis merupakan salah satu perubahan signifikan di Turki. Hal ini

membuat khawatir pihak posisi dan sebagian rakyat yang menganggap Erdogan menjadi otoriter.¹⁴

Fethullah Gulen memulai gerakan ini, yang disebut Hizmet pada tahun 70-an dengan tujuan mencanangkan visi generasi emas. Kemudian para pemuda didikan Gulen disebar ke seluruh lini negara termasuk militer dan kepolisian. Gulen memimpikan para pengikutnya menjadi para pemimpin masa depan melalui penetrasi kelembagaan negara dan birokrasi pemerintah.¹⁵ Seiring perjalanan waktu, gerakan *Hizmet* menjadi gerakan besar tidak hanya di Turki, tetapi menyebar ke mancanegara dengan aset ribuan sekolah sekolah di Turki maupun di luar negeri seperti di Indonesia.

Menurut BBC, sebanyak 1.577 dekan universitas negeri maupun swasta di Turki dipaksa mundur. Sebelumnya, 20 ribu pengajar dan staf administrasi lembaga pendidikan bernasib sama. Sudah ada 6.000 tentara ditahan, 99 jenderal didakwa, dan 2.700 hakim dan jaksa ditahan. 131 kantor media pun juga ikut ditutup. Stasiun televisi NTV juga menyatakan, menyusul peristiwa kudeta militer, para PNS dilarang bepergian ke luar negeri. Selain itu Kantor berita Anadolu mengatakan 8.777 PNS dipecat, termasuk 30 gubernur, 52 pegawai pamong praja, dan 16 penasihat hukum. Pemerintah juga membidik media yang diduga kuat berafiliasi dengan kelompok Fethullah Gulen. Sedikitnya 131 koran, stasiun televisi dan media online dibredeldan memerintahkan penahanan pemimpin redaksi surat kabar oposisi, *Cumhuriyet*, menyusul penutupan dan pembubaran sejumlah media yang dituduh memiliki kaitan dengan kelompok penggerak kudeta.¹⁶

¹⁴ [https://www.selasar.com/jurnal/33367/Erdogan,-Gulen,-dan-Turki-Pascakudeta-\(Bag.-1\)](https://www.selasar.com/jurnal/33367/Erdogan,-Gulen,-dan-Turki-Pascakudeta-(Bag.-1)) diakses pada 7 November 2017

¹⁵ S. Shroff, 2009, *Muslim Movements Nurturing A Cosmopolitan Muslim Identity: The Ismaili and Gülen Movement*, Georgetown University, Washington D.C., hal. 71.

¹⁶ http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/kudeta_turki diakses pada 7 November 2017

Pada tanggal 29 September 2016, secara mengejutkan Presiden Erdogan memperpanjang masa darurat sampai satu tahun. Untuk tahap pertama, Erdogan akan memperpanjangnya selama tiga bulan, setelah itu dilanjutkan dengan tiga bulan lainnya sampai setahun. Banyak anggota parlemen Turki dan politisi lainnya tak setuju dengan perpanjangan masa darurat tersebut. Namun, Erdogan mengabaikan protes dan kecaman dari para pengkritiknya itu.¹⁷Sikap arogan dari Erdogan ini semakin membuat pihak oposisi khawatir bahwa Erdogan semakin otoriter.

Terlebih pada hari Minggu 16 April 2017, Presiden Recep Tayyip Erdogan memenangkan referendum yang digelar untuk mengubah sistem parlementer Turki menjadi presidensial sekaligus memberikan wewenang yang lebih besar untuk presiden dan tentu saja menguatkan peran eksekutif. Referendum ini tak bisa dipungkiri merupakan perkembangan politik paling penting di negeri itu sejak Republik Turki berdiri pada 1923. Erdogan menyatakan ada 25 juta orang yang mendukung amandemen konstitusi, atau 51,5 persen pemilih, terpaut tipis dari kubu yang berseberangan. Banyak yang khawatir kemenangan ini akan mengubah pemerintahan Erdogan menjadi otoriter. Kekhawatiran menyeruak terlebih karena 18 amandemen yang diajukan akan memberikan kewenangan lebih besar bagi pemimpin negara dan menafikkan peran parlemen dalam sistem presidensial yang baru.

Amandemen setidaknya akan diimplementasikan pada 2019 dalam pemilihan presiden baru. Dalam amandemen tercakup perpanjangan kekuasaan presiden menjadi 5 tahun, dan boleh menjabat 2 periode, maka Erdogan bisa mencalonkan diri sebagai presiden pada 2019 dan 2024. Artinya, dia bisa terus berkuasa hingga 2029 dan sekaligus

¹⁷ <https://www.selasar.com/jurnal/33368/Erdogan-Gulen-dan-Turki-Pascakudeta-Bag-2> diakses pada 7 November 2017

menjadi pimpinan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang ia dirikan. Selama ini, peran presiden dalam sistem kenegaraan Turki sebagian besar sekadar seremonial. Dengan adanya amandemen konstitusi ini maka peran eksekutif atau presiden dalam politik Turki menjadi semakin *powerfull*.

B. Pokok Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas, dapat ditarik sebuah rumusan masalah : Mengapa Terjadi Kecenderungan Otoritarianisme dalam Politik dan Pemerintahan Republik Turki di Era Presiden Erdogan?

C. Kerangka Teori

Untuk menjelaskan serta menjawab pokok permasalahan tersebut di atas, penulis menggunakan Konsep Kekuasaan, Teori Transisi Demokrasi dan Konsep Otoritarian Birokratik.

1. Konsep Kekuasaan

Di antara konsep politik yang banyak dibahas adalah kekuasaan. Hal ini tidak mengherankan sebab konsep kekuasaan sangat krusial dalam ilmu sosial pada umumnya dan dalam ilmu politik khususnya. Menurut Mohtar Mas'ued dan Nasikun, Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi pikiran atau tingkah laku orang atau kelompok orang lain, sehingga orang yang dipengaruhi itu pun rela melakukan sesuatu yang sebetulnya orang itu enggan untuk melakukannya. Bagian penting dari pengertian kekuasaan ini yakni syarat adanya keterpaksaan, dimana keterpaksaan pihak yang dipengaruhi untuk mengikuti pihak yang memengaruhi.¹⁸

¹⁸ Mohtar Mas'ued dan Nasikun, *Sosiologi Politik*, PAU-Studi Sosial UGM, Yogyakarta , 1987 hal 22

Biasanya kekuasaan diselenggarakan melalui isyarat yang jelas. Ini sering dinamakan dengan kekuasaan manifes (manifest power). Namun kadang-kadang isyarat itu tidak ada, misalnya dalam keadaan yang Carl Friedrich dinamakan *the rule of anticipated reactions*. Perilaku B ditentukan oleh reaksi yang diantisipasi jika keinginan A tidak dilakukan oleh B. Bentuk kekuasaan ini sering dinamakan kekuasaan implisit (implicit power).

Kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, sekelompok orang atau suatu negara terhadap pihak lain, membuat penguasa tersebut berupaya untuk mencapai keinginan dan tujuannya. Ada berbagai cara untuk mempertahankan kekuasaan, baik dilakukan dengan cara yang damai ataupun dengan cara kekeerasan. Cara damai dilakukan dengan demokrasi dan mencari dukungan pihak lain. Sedangkan cara kekerasan, yakni dengan penindasan dan memerangi pihak yang menentang kekuasaannya, atau menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan. Seperti yang disampaikan oleh Haryanto, dalam masyarakat yang tidak demokratis atau yang dipimpin oleh seorang diktator, penguasa mempertahankan kekuasaannya dengan paksaan dan ada kecenderungan penguasa masuk terlalu jauh untuk mengatur kehidupan dan kepercayaan hingga hal-hal pribadi warganya sesuai dengan keinginan dari penguasa. Dengan cara paksaan, warga diarahkan untuk patuh pada penguasa.¹⁹

Menurut Miriam Budiarto, kekuasaan politik merupakan hal yang paling penting untuk dipertahankan, karena dengan kekuasaan politik, penguasa dapat memengaruhi kebijakan umum, baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan. Kekuasaan politik tidak hanya mencakup kekuasaan untuk mendapat ketaatan warga masyarakat, tetapi juga menyangkut pengendalian orang lain dengan tujuan untuk memengaruhi tindakan dan aktivitas

¹⁹ Haryanto, *Kekuasaan Elit, Suatu Bahasan Pengantar*, S2 PLOD UGM dan JIP UGM, Yogyakarta, 2005, hal 57

penguasa di bidang administratif, legislatif dan yudikatif .²⁰Cara –cara untuk mempertahankan kekuasaan yakni ; menghilangkan peraturan-peraturan lama (terutama pada bidang politik), mengadakan sistem kepercayaan, pelaksanaan administrasi dan birokrasi yang baik, mengadakan konsolidasi horizontal dan vertical.

Presiden Erdogan sebagai penguasa tentu saja menginginkan kekuasaannya tetap bertahan, oleh karena itu dengan cara-cara yang represif dan otoriter bahkan cenderung menghalalkan segala cara, kekuasaan Erdogan dapat tetap bertahan.Seperti yang menjadi dugaan banyak pihak, Erdogan mengorganisir peristiwa besar seperti kudeta hingga terjadinya referendum, dibalik semua itu adalah skenario Erdogan karena terdapat motif politik yakni untuk mempertahankan kekuasaannya.

2. Teori Transisi Demokrasi

Wacana transisi demokrasi,pertama kali dilontarkan oleh ilmuwan Perbandingan Politik Amerika Serikat Dankwart A. Rustow pada awal 1970-an sebagai semacam pengantar bagi yang lain untuk menjelaskan fenomena-fenomena politik yang berkembang pada masa itu, seperti Marxisme di Amerika, keterlibatan militer dalam politik, hingga kelompok kepentingan di Uni Soviet.Isu militer dan politik termasuk isu populer dalam konteks transisi politik di banyak negara berkembang pada 1970-an. Kendatipun kondisi demokrasi yang tidak stabil rata-rata berujung pada hadirnya rejim militer otoritarian.²¹

Perspektif transisi demokrasi kemudian dikembangkan terutama oleh O’ Donnell dan rekan-rekannya dalam

²⁰ Miriam Budiardjo, DASAR-DASAR ILMU POLITIK, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal 61

²¹ Dankwart A. Rustow,“Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model.”dalam Lisa Anderson (Ed.),Transitions to Democracy, hal 17

serangkaian penelitian di sejumlah negara Amerika Latin dan Eropa Selatan. Yang dimaksud transisi adalah interval waktu antara satu rezim politik dengan yang lain, karena transisi menuju demokrasi merupakan ikhtiar mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Merujuk O'Donnell, pemerintahan demokratis adalah yang mampu melewati masa transisi dan berkonsentrasi pada konsolidasi demokrasi. Dalam konteks ini, hubungan sipil militer menjadi prasyarat penting. Sebagaimana disinyalir oleh Diamond, demokrasi tidak dapat terkonsolidasi hingga militer secara pasti berada dibawah kendali sipil dan taat pada tatanan konstitusi yang demokratis.²² Konsep hubungan sipil-militer lazim diarahkan kepada aspek-aspek idealnya, militer mundur dari politik dan memerankan diri sebagai instrumen, agar kepemimpinan politik sipil dapat menentukan tujuan-tujuan politik dan membuat kebijakan –kebijakan negara.

Namun transisi demokrasi juga bukan tidak beresiko. Menurut Guillermo O' Donnell & Philippe C. Schmitter, dalam masa transisi tidak bisa dipastikan apakah masa sesudah transisi selalu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Keadaan yang akan terjadi setelah transisi adalah sesuatu ketidakpastian. Transisi bisa saja menghasilkan sebuah pencerahan bagi demokrasi dengan berakhirnya rezim otoriter, namun juga dapat berkembang menjadi konfrontasi sengit dan meluas, yang membuka jalan bagi rezim-rezim revolusioner yang ingin melakukan perubahan drastis. Artinya masa transisi merupakan masa yang sulit untuk diprediksikan. Pada masa transisi keadaan politik suatu negara dalam keadaan yang tidak stabil, sehingga segala kemungkinannya bisa saja terjadi. Selain itu hal yang ditakutkan selama masa transisi demokrasi adalah terjadinya kudeta militer dan the return to the "good old time" of "order", "social peace", dan "respect for authority".

²² Larry Diamond, "introduction: In Search of Concolidation." Dalam Larry Diamond, Marc F. Plattner, Yunhan Chu, dan Hungmao Tien (Ed). *Consolidating the Third Wave Democracies; Regional Challenge*. Baltimore: Johns. Hopkins University Press, 1997, hal 308

Dalam, sebuah proses transisi, aturan main politik menjadi tidak menentu karena instabilitas yang terjadi. Hal ini disebabkan karena banyaknya kelompok kepentingan yang akan memperjuangkan kepentingannya masing-masing pada masa transisi yang sangat rawan terhadap perubahan. Diperlukan sebuah kesepakatan politik diantara kelompok kepentingan yang beramin dalam menentukan prosedur politik tersebut. Namun jika kesepakatan tersebut tidak terwujud, maka pertikaian diantara kelompok kepentingan akan terus terjadi, dan bukan tidak mungkin rezim yang lama akan berkuasa kembali.

Dalam perdebatan mengenai daya tahan demokrasi di Timur Tengah, banyak diskusi hingga saat ini yang menekankan bahwa demokrasi terjadi karena kondisi struktural. Namun Waterbury dan Salame lebih menekankan pada agensi atau elit yang berkuasa yakni kalkulasi elit dan resiko transisi demokrasi, dengan kata lain apa yang dilakukan elit sangat penting bagi hasil politik. Banyak transisi demokrasi dimulai atau diinisiasi oleh elit namun tampaknya masuk akal bahwa elit politik, sebagai aktor rasional, hanya akan melakukan demokratisasi jika mereka berpikir bahwa kepentingan mereka akan bertahan atau bahkan meningkat oleh transisi dari otoritarianisme ke demokrasi, atau bahwa biaya dan risiko demokratisasi akan lebih rendah dari pada otoritarian yang terus berlanjut. Seperti yang dikemukakan Waterbury dan Salame, para elit tidak perlu melakukan demokrat untuk memulai demokratisasi jika alternatifnya adalah situasi krisis atau buntu yang tidak diinginkan yang tidak dapat diatasi.²³

²³ For the transition literature and pacts, see G. O'Donnell, P. Schmitter and L. Whitehead, *Transitions from Authoritarian Rule* (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 4 vols, 1986); for Middle East applications, see Waterbury in Salame (note 5), hal. 33–41 and Jean Leca, 'Democratization in the Arab World: Uncertainty, Vulnerability and Legitimacy', in Salame (note 5), hal. 49–53.

Di era pemerintahan Presiden Erdogan, tarik ulur dan konflik kepentingan dalam pemerintahan begitu terlihat, khususnya pihak sekuler dan oposisi yang tidak suka dengan kebijakan-kebijakan Presiden Erdogan hingga terjadinya kudeta militer. Peristiwa ini telah mengacaukan pemerintahan Turki dan menciptakan kondisi yang tidak stabil begitu juga kegaduhan sosial. Oleh karena itu otoritarian adalah langkah yang dilakukan menciptakan kondisi politik yang stabil dan ketertiban sosial. Selain itu pihak sekuler dan oposisi yang selalu kontra dengan Erdogan justru akan “menghambat” kebijakan-kebijakan pemerintah, begitu juga dengan adanya media-media oposisi yang terus mengkritik Erdogan. Selain itu gerakan *Hizmet* yang dipimpin Fethullah Gulen telah menjadi gerakan transnational yang berpengaruh di dalam dan luar Turki dinilai sebagai ancaman serius pemerintahan Presiden Erdogan. Pemerintah sebagai aktor rasional tentu mempertimbangkan resiko dari demokrasi ini, maka dengan cara yang bersifat otoriter, kepentingan-kepentingan Erdogan dan partai AKP tetap bisa berjalan dengan mulus.

3. Konsep Otoritarian Birokratik

Istilah “otoriter” berasal dari bahasa Inggris, *authority* yang merupakan turunan dari kata Latin *autocritas*. Kata ini berarti pengaruh, kuasa, wibawa, atau otoritas. Dengan otoritas ini, seseorang dapat memengaruhi pendapat, pemikiran, gagasan, dan perilaku orang lain, baik secara perorangan maupun kelompok. Secara semantik istilah “otoriter” menunjuk pada pengertian sisi buruk sifat dan perilaku seseorang (baik dalam konteks relasi pribadi, sosial maupun politik) yang disandarkan semata-mata lebih pada basis otoritas (kuasa dan wewenang) yang dimiliki atau dipegangnya.

Dalam diskursus politik, istilah “otoriter” ini kemudian lazim digunakan untuk menyebut kecenderungan sifat dan

perilaku kekuasaan yang anti-demokrasi, yang secara semantik berasal dari akar kata yang sama, *autocritas*, *authority*; dan melahirkan turunan konsep “ideologis”, *authoritarianism* (otoritarianisme). Sebuah konsep yang merujuk pada pemahaman tentang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dengan kontrol (pengendalian) penuh atau nyaris penuh oleh penguasa (eksekutif). Sistem politik otoriter dengan demikian merupakan sistem politik yang didasarkan lebih pada kekuatan otoritas atau kekuasaan monolitik yang dipegang oleh pemimpinnya, baik individu (yang didukung oleh elit-elit strategis yang bersekongkol) maupun dalam bentuk kepemimpinan oligarkis; dan pada saat yang sama : mengesampingkan prinsip-prinsip demokrasi dan konsensus, bahkan seringkali juga menisbikan keberadaan konstitusi negaranya.

Sistem politik otoriter merupakan ciri khas kepolitikan negara-negara berkembang yang baru memulai atau sedang melakukan proses pembangunan sebagai tahapan awal menuju negara industri. Hal ini tentu bukan tanpa alasan, dan sama sekali juga bukan suatu kebetulan. Negara-negara berkembang pada umumnya menghadapi berbagai situasi dan gejala yang mirip, jika tidak persis sama sekali. Gejala-gejala itu misalnya menyangkut soal integrasi nasional yang masih lemah; minus pengalaman menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan; tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah; sementara pada saat yang sama tuntutan terhadap perbaikan hidup dan kesejahteraan mulai muncul sebagai konsekuensi dari sebuah masyarakat merdeka dan berdaulat.²⁴

Dalam situasi demikian, para pemimpin di negara-negara berkembang suka tidak suka dituntut untuk mencari dan menentukan pilihan model sistem pemerintahan yang harus segera diterapkan di negaranya. Dwight Y. King membuat

²⁴ Alfred Stepan, *Militer dan Demokratisasi; Pengalaman Brasil dan Beberapa Negara Lain*, Grafiti, 1996, Jakarta, hal 63

konsep model negara birokratik otoritarian (*bureaucratic authoritarianism*). Konsep birokratik otoritarian ini semula digunakan oleh Juan Linz dalam studinya mengenai Spanyol, yang kemudian dikembangkan oleh Guillermo O'Donnell untuk memahami realitas masyarakat-masyarakat yang sedang melakukan pembangunan ekonomi-politik terutama di kawasan Amerika Latin²⁵

Rezim birokratik otoritarian ini bertujuan membuat keputusan yang sederhana, tepat, tidak bertele-tele, dan efisien yang tidak memungkinkan adanya proses bargaining dan perdebatan-perdebatan berkepanjangan, melainkan mencukupkan diri pada pendekatan "teknokratik-birokratik" dengan pertimbangan semata-mata "efisiensi". Rezim ini didukung oleh unsur-unsur yang dapat mendukung proses pembangunan yang efisien, yaitu kalangan militer, teknokrat sipil, dan para pemilik modal.

Jadi alasan utama "ideologis", jika bisa disebut demikian, mengapa suatu negara atau para pemimpin suatu negara mengambil pilihan jalan otoritarianisme dalam mengoperasikan sistem politik kekuasaannya adalah untuk kepentingan efisiensi politik dalam proses pengambilan keputusan-keputusan publik demi kepentingan yang lebih besar, yakni proses pembangunan negara sebagai satu-satunya jalan untuk mewujudkan cita-cita kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Setidaknya, begitulah yang dipikirkan dan menjadi argumentasi para pemimpin negara berkembang yang menerapkan model sistem politik otoriter.

Selama ini dalam pemerintahan di Turki, proses pembuatkan kebijakan selalu melalui prosedur palemen, proses yang bersifat demokratis ini membuat adanya perang kepentingan dan proses menjadi bertele-tele, maka

²⁵ Hertanto, 2006, *Teori-Teori Politik dan Pemikiran Politik di Indonesia*, 2006, Tiara Wacana, Yogyakarta, hal 47

otoritarianisme yang dilakukan Erdogan termasuk penguatan eksekutif, adalah untuk menciptakan proses pengambilan keputusan politik yang efisien dan tidak bertele-tele karena demokrasi justru menyediakan jalan panjang dan berliku dalam proses pembuatan kebijakan.

D. Hipotesa

Dari paparan teori pada poin-poin sebelumnya, penulis menggunakan beberapa hipotesa sebagai berikut :

Terjadinya kecenderungan otoritarianisme dalam politik dan pemerintahan Republik Turki di era Presiden Erdogan adalah karena :

1. Untuk mempertahankan kekuasaan Presiden Erdogan.
2. Untuk menciptakan kondisi politik yang stabil pasca kudeta pada tahun 2016, yang mengakibatkan kegaduhan politik dan adanya kalkulasi para elit, yakni Erdogan dan AKP akan resiko demokrasi karena kebebasan yang lebih banyak menimbulkan kegaduhan sosial dan instabilitas politik.
3. Untuk menciptakan proses pengambilan keputusan politik yang efisien dan tidak bertele-tele karena demokrasi menyediakan jalan panjang dan berliku.

E. Tujuan Penulisan

Dalam menyusun skripsi ini, terdapat beberapa aspek yang menjadi tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengapa terjadi kecenderungan otoritarianisme dalam politik dan pemerintahan Republik Turki di era Presiden Erdogan.
2. Sebagai manifestasi dari pengaplikasian teori-teori yang didapatkan selama duduk di bangku kuliah.
3. Untuk memenuhi persyaratan pencapaian gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penulisan penelitian ini yakni semenjak terpilihnya Recep Tayyip Erdogan sebagai Presiden Turki pada tahun 2014 sampai pada skripsi ini dibuat (2018).

G. Metode Pengumpulan Data

a. Jenis Penelitian

Dalam penyelesaian tulisan ini, digunakan metode penelitian kualitatif dengan cara LibRARY Research yaitu dengan memanfaatkan data-data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka yang disaring dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, buletin, surat kabar, majalah, artikel ilmiah dan internet serta beberapa informasi yang mendukung penelitian ini.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisa kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan analisa tentang Presiden Recep Tayyip Erdogan membangun Republik Turki ke arah otoritarianisme, yang data-datanya bersifat kepustakaan.

H. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penelitian ini dibagi menjadi 4 bab utama, yang masing-masing bab memiliki wilayah penjelasan yang berbeda-beda.

Pada bab 1 berisi tentang mulai dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka berfikir, hipotesa, tujuan penulisan, jangkauan penelitian sampai dengan sistematika penulisan.

Bab 2 menjelaskan tentang dinamika sejarah dan karakteristik politik negara Republik Turki.

Bab 3 menjelaskan tentang Republik Turki dibawah kepemimpinan Erdogan dan AKP serta transformasi kebijakan Erdogan menjadi otoritarian.

Bab 4 berisikan analisa mengapa terjadinya kecenderungan otoritarianisme dalam politik dan pemerintahan Republik Turki di era Presiden Erdogan.

Bab 5 berisikan penutupan berupa kesimpulan penelitian.

